

Polarisasi Isu , Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019

Pangi Syarwi

Penulis adalah Dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno Jakarta dan Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol CenterResearch and Consulting
pangisyarwi@ubk.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini membahas terkait polarisasi isu dan politik identitas yang menyebabkan keterbelahan publik pada pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber Primer diperoleh melalui wawancara. Parameter pemilihan narasumber yaitu memahami dan menguasai permasalahan politik identitas. Sumber sekunder diperoleh dari kajian pustaka yakni buku, jurnal, artikel, majalah dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polarisasi isu, politik identitas telah menyebabkan kerusakan yang nyata merusak tenun kebangsaan pada pilpres 2019. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang kuat, tidak boleh ada lagi tempat atau ruang untuk membuka “kotak pandora” politik identitas dengan polarisasi isu yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, karena kerusakan dan dampaknya terlalu besar, polarisasi dan politik identitas tidak boleh terjadi lagi. Setidaknya ada 3 (tiga) cara yang mesti dilakukan untuk meredam “politik identitas” dan “keterbelahan publik” dalam kontestasi elektoral pilpres 2024. Pertama; calon presiden minimal harus ada 3 pasang calon presiden, sehingga ada pemecang gelombang agar tidak terulang kembali kontestasi “rematch” pilpres 2014 dan 2019 dengan kekuatan “head to head” (bipolar) bertumpu pada dua kutub pasangan calon presiden. Kedua; harus ada penegakan hukum yang adil tanpa diskriminatif terhadap para buzzer politik, tim sukses, relawan maupun calon presiden apabila terbukti menggunakan politik identitas, sanksi yang keras dan tegas berupa pidana dan pemotogan masa waktu kampanye agar ada efek jera. Ketiga; harus ada “konsensus” dan komitmen bersama untuk “tidak” lagi menggunakan “narasi politik identitas” dan isu-isu “SARA” yang jelas merusak tatanan kehidupan berbangsa, rasa persatuan dan kesatuan bernegara.

Keywords: Polarisasi Isu, Keterbelahan Publik, Politik Identitas, Pemilu Serentak 2019

ABSTRACT

This journal discusses the polarization of issues and identity politics that caused public division in the 2019 presidential election. This study uses a qualitative method with primary and secondary data sources. Primary sources were obtained through interviews. Parameters for selecting resource persons are understanding and mastering the issue of identity politics. Secondary sources are obtained from literature review, namely books, journals, articles, magazines and research reports. The results show that the polarization of issues, identity politics has caused real damage to the fabric of nationality in the 2019 presidential election. Therefore, we as a strong nation, there should be no more place or space to open the “Pandora's box” of identity politics with polarization of issues that destroying national unity and integrity.

Thus, because the damage and impact is too great, polarization and identity politics should not happen again. There are at least 3 (three) ways to reduce “identity politics” and “public division” in the 2024 presidential election electoral contestation. First; Presidential candidates must have at least 3 pairs of presidential candidates, so that there are breakers so that the 2014 and 2019 presidential election “rematch” contestations are not repeated, with the power of “head to head” (bipolar) resting on the two poles of presidential candidate pairs. Second; there must be fair law enforcement without being discriminatory against political buzzers, success teams, volunteers and presidential candidates if they are proven to use identity politics, harsh and firm sanctions in the form of crimes and cutting off the campaign period so that there is a deterrent effect. Third; there must be “consensus” and a shared commitment to “no longer” use “identity political narratives” and “SARA” issues which clearly damage the order of national life, the sense of unity and oneness of the state.

Keywords: Polarization of Issues, Public Separation, Identity Politics, 2019 Simultaneous Elections

PENDAHULUAN

Pemilu bukan sekadar prosedur formal dalam berdemokrasi, ia mesti mampu berkontribusi bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu, pemilu harus dikelola dengan benar dan dipastikan terselenggara sesuai prinsip pemilu yang demokratis. Karenanya, mengevaluasi perjalanan pemilu menjadi keniscayaan, agar pemilu tidak menjadi business as usual. Perbaiki atas kelemahan sistem, proses, dan mekanisme yang ada mutlak dilakukan sehingga hasil pemilu pun bisa sesuai dengan substansi yang diharapkan. Memotret rangkaian panjang proses pemilu 2019 dan mengajak kita bersama-sama untuk menambal berbagai kelemahan yang ada dan memperkuat segala yang sudah baik. Pemilu kita ini sangat kompleks, dibutuhkan kesiapan dari semua elemen yang terlibat. Bukan hanya dari sisi kontestan dan penyelenggara tapi juga masyarakat perlu di edukasi bahwa kontestasi dalam pemilihan presiden ini bukan pertarungan hidup dan mati. Di sisi lain, kita juga membutuhkan media yang independen. Sebab, media yang punya afiliasi politik tertentu akan cenderung menyalahi dan merusak fungsinya sebagai pilar demokrasi. Kita juga harus membangun suasana sportivitas dalam politik, yang paham kapan saatnya untuk berkompetisi dan saatnya untuk bersatu.

Dalam demokrasi, pemilihan umum merupakan prosedur untuk pergantian kekuasaan yang dilaksanakan secara reguler, misalnya lima tahun. Untuk menandai terjadinya konsolidasi, menurut Juan Jose Linz dan Alfred Stepan (1996), demokrasi dikatakan mapan ketika negara tersebut sudah dua kali melakukan pergantian kekuasaan dalam proses pemilu yang jujur dan adil. Sampai tahun 2019, Indonesia sudah empat kali menyelenggarakan pergantian kekuasaan lewat pemilu presiden. Sayangnya, kualitas demokrasi kita belum lah

seperti yang dikonsepsikan Linz dan Stepan. Alih-alih berubah menjadi negara dengan demokrasi mapan, peluang yang terjadi justru sebaliknya. Demokrasi di negara kita tidak sepi dari ujian. Tanpa perjuangan bersama, demokrasi kita benar-benar rentan berada di ujung tanduk dan mudah saja dikuasai oleh para bandit.

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kontestasi elektoral di tahun 2019. Sebagian kalangan melihat Pemilu 2019 sebagai sebuah cerita sukses penerapan model pemilu yang demokratis, sementara kalangan lain menganggap pemilu tersebut sebagai pemilu paling brutal dalam sejarah pemilu bangsa. Mengingat kembali hari-hari berat ketika kontestasi pemilihan umum presiden dan legislatif. Hanya menyisakan dua kandidat dan memberi implikasi yang sangat dalam pada pertentangan dan keterbelahan publik. Dalam banyak hal dapat dikatakan positif, tapi apabila tidak dipersiapkan bisa berbahaya karena efek pembelahannya turun sampai ke masyarakat paling bawah, kerusakan sudah kita rasakan, keterbelahan yang membuat luka dalam, berpotensi merusak tenun kebangsaan kita.

Oleh karena itu, mempersiapkan pemilu 2024 agar tercipta sistem yang lebih baik, yang lebih antisipatif terhadap keadaan masyarakat. Dan yang lebih penting tentang bagaimana kita harus mendesain sistem pemilu yang cocok dan sehat, semisal mengakhiri, menghapus presidential threshold 20 persen. Sehingga kompetisi berlangsung secara lebih masif, dan masyarakat tidak terburu-buru “terbelah” (karena pada putaran kedua barulah tersisa dua kandidat), itu akan lebih sehat. Menunjukkan baik politisi maupun pemilih sebagian besar memilih partai sesuai dengan preferensi ideologis mereka tentang peran Islam di negara, ketika pemilih memilih untuk mendukung partai yang mencerminkan “preferensi ideologis”. Polarisasi isu yang dibenturkan termasuk pragmatisme politik jangka pendek di dalam setiap perhelatan kontestasi elektoral pilpres.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber Primer diperoleh melalui wawancara. Parameter pemilihan narasumber yaitu memahami dan menguasai permasalahan polarisasi dan politik identitas. Adapun yang menjadi tahapan pendekatan penulisan dalam penelitian dengan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam terhadap objek yang diteliti, dan melakukan kajian analisa yang mendalam terkait fenomena keterbelahan publik pada pemilu serentak presiden dan legislatif tahun 2019 akibat polarisasi. Sumber sekunder diperoleh dari kajian pustaka yakni buku, jurnal, artikel, majalah dan laporan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu menemukan fakta dan

melihat secara realitas fenomena di lapangan dengan relevansi teorinya. Untuk menjawab dan menyimpulkan pemecahan permasalahan penelitian dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan dan penyusunan data yang diperoleh sumber- sumber dokumentasi dan studi literatur lainnya.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya kampanye politik bertujuan adalah memengaruhi pemilih untuk mengarahkan dukungan dan menjatuhkan pilihan pada kandidat tertentu pada saat pemilihan umum. Dalam memengaruhi pemilih, para politisi akan melakukan berbagai cara dan teknik kampanye yang sudah umum dan lumrah dilakukan dalam ajang kontestasi elektoral. Ada beberapa model kampanye: kampanye positif (positive campaign), kampanye negatif (negative campaign), kampanye gelap (black campaign). Kampanye positif dilakukan dengan menyampaikan dan mempromosikan kandidat. Nilai-nilai atau pesan positif tentang kandidat menjadi bahan utama yang diproduksi sedemikian rupa untuk menarik minat pemilih untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin. Kampanye positif juga bisa digunakan sebagai upaya pembelaan diri jika ada serangan dari lawan politik yang bisa merusak (downgrade) citra seorang kandidat. Kampanye negatif dilakukan untuk menjatuhkan ataupun merusak citra diri kandidat tertentu. Kampanye negatif biasanya berbasis pada data dan fakta yang dikemas sedemikian rupa. Kampanye negatif dilakukan secara agresif menyerang lawan politiknya untuk menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Adapun kampanye gelap bertujuan untuk membunuh karakter lawan politik, namun informasi yang disampaikan bermuatan fitnah, kebohongan, ujaran kebencian.

Situasi tersebut tentu sangat tidak kita harapkan, menggunakan isu identitas untuk kepentingan pribadi dan kelompok sungguh sangat tak patut, terlebih hanya demi kepentingan politik sesaat. Masa kampanye pemilihan presiden oleh tiap-tiap tim sukses kandidat di ruang publik kita cenderung diisi oleh kebisingan yang penuh dengan sensasi. Narasi dari kedua capres dan timnya masih berkutat pada isu murahan yang jauh dari substansi dan belum menyentuh soal-soal yang berhubungan langsung dengan isu utama apa yang menjadi kebutuhan dan problem riil rakyat. Isu-isu murahan tersebut secara tidak langsung menunjukkan kualitas dan kapasitas pasangan capres yang sekarang sedang bertarung. Kedua pasangan capres seperti gamang untuk menyampaikan visi-misi dan program nyata yang akan ditawarkan kepada pemilih. Situasi ini pada akhirnya membuat kita curiga, jangan-jangan

capres memang tidak punya kapasitas yang memadai untuk berdebat dalam hal-hal yang lebih substansial.

Kepemilikan isu mengacu pada hubungan antara isu dan partai di benak pemilih. Dengan kata lain, kepemilikan isu berkaitan dengan penilaian pemilih terhadap partai-partai terkait dengan kemampuan partai “mengatasi” isu-isu tertentu. Partai memiliki “isu” jika pemilih menganggap partai paling mampu menangani isu tertentu, pemilih kemudian menganggap partai tersebut paling kompeten dan/atau berkomitmen untuk menangani isu tersebut. Contoh sederhana adalah “Partai Hijau” yang memiliki isu “lingkungan” atau partai “Sayap Kiri” yang dianggap paling kompeten/berkomitmen untuk menangani isu-isu “kesejahteraan” (Seeberg, 2016). Diterapkan pada pemilu, teori kepemilikan isu, baik dari kompetensi maupun varian asosiatif, menyatakan bahwa partai-partai melihat perolehan suara meningkat apabila “isu-isu” yang mereka miliki menjadi lebih “menonjol” di antara para pemilih. Sejumlah penelitian menghasilkan bukti langsung atau tidak langsung yang mendukung klaim ini (lihat: Budge and Farlie, 1983; Petrocik dkk., 1989).

Kepemilikan isu menyiratkan membangun reputasi untuk kompetensi yang lebih besar dan perhatian untuk isu-isu tertentu dengan lebih menekankan. Dengan kata lain, persepsi kepemilikan isu didasarkan pada informasi eksternal yang nyata bagi pemilih yang dihasilkan dari tindakan aktual partai-partai terkait dengan isu-isu (Walgrave et al., 2012). Pemilih cenderung mengatribusikan kepemilikan suatu isu tertentu lebih kepada pihak yang memberikan perhatian terhadap isu tersebut daripada pihak yang tidak. Pemilih hanya menominasikan partai mereka sendiri sebagai partai yang paling mampu “menangani” masalah apapun (lihat juga: Rahn et al., 1994). Ketika kekurangan informasi, dan karena partai pilihan mereka adalah “top of mind” bagi sebagian besar pemilih, preferensi partai digunakan sebagai heuristik untuk menjawab pertanyaan “kepemilikan isu”.

Lebih parahnya lagi situasi ini menular pada tim sukses dan juru bicara. Tim sukses sepertinya lebih suka melakukan pembelaan secara mati-matian ketimbang memberikan saran dan masukan yang lebih produktif dan berbobot pada calonnya. Melakukan pembelaan membabi buta, bahkan terkadang melakukan perdebatan yang tidak pantas dipertontonkan di hadapan publik. Mulai dari pemilihan kata yang digunakan, menyerang karakter dan pribadi seseorang, sampai pada caci maki. Setali tiga uang, “penyakit” politisi tersebut juga menular pada masyarakat secara luas. Ini akibat terpapar tontonan tidak mendidik dari politisi dan para jubar yang miskin dialektika dan nalar berpikir. Belum mampu mengendalikan diri dan lebih bijak menahan diri menghadapi bermacam persoalan.

Mengapa narasi kampanye dangkal masih berulang? Apakah kenyataan ini memang sengaja didesain untuk mengarahkan para kandidat terjebak dalam perang kata-kata, saling sindir sehingga terjauh dari substansi persoalan? Dengan kata lain, ini merupakan bagian dari strategi politik untuk mengalihkan perbincangan publik untuk tidak terlalu dalam menyentuh persoalan yang lebih substantif. Mengapa? Karena ada pihak-pihak yang khawatir akan merugikan kepentingan politiknya jika perdebatan politik mengarah pada hal-hal yang lebih substantif. Yang jadi pertanyaan, mengapa kubu Jokowi dan Prabowo Subianto memainkan gimmick politik saling sindir? Apakah karena waktu kampanye pilpres yang cukup lama, ataukah memang capres-cawapres yang turut kontes malah kehilangan imajinasi dan narasi menjadi bangsa yang besar? Mestinya perilaku politik capres-cawapres berpanduan pada moral dan habitus politik yang baik.

Konteks ideologi dikaitkan dengan isu polarisasi yang menguat pada pemilu 2019, membuat capres incumbent Jokowi, yang disokong oleh kekuatan birokrasi, penetrasi aparat keamanan, kekuatan logistik, kekuatan partai koalisi, polarisasi ideologi yang makin mengeras di masing-masing provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat pasangan capres/cawapres Prabowo-Sandi di mana wilayah yang tingkat kemenangan cukup tinggi. Sementara Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur pasangan capres/cawapres Jokowi-Ma'ruf wilayah kemenangan cukup besar. Apakah pemilih meninggalkan partai, meniadakan program, strategi kampanye, mesin partai dan figur karena terjadinya polarisasi ideologis, di mana antara strategi dan narasi kampanye dengan hasil akhir tidak berkesesuaian? Hasil perolehan suara Jokowi-Ma'ruf tetap tidak maksimal hanya sebesar 55,50 persen, justru split-nya Jokowi negatif di pemilihan presiden 2019. Itu juga yang kemudian membuat basis-basis pemilih Prabowo digempur pakai strategi apapun tetap split ticket votingnya positif. Padahal logistiknya kalah jauh dari petahana presiden Jokowi, di tengah kekurangan logistik, polarisasi yang menguat membuat pembelahan secara ideologis.

Party-ID dalam konteks tingkat ideologi, riset ini dikaitkan dengan isu polarisasi isu ideologi yang menguat pada pemilu presiden 2019. Isu Ideologi bagaimana dikaitkan dengan polarisasi tak bisa diabaikan, polarisasi yang menguat membuat pembelahan secara ideologis dan itu membuat baik pada basis-basis pemilih Prabowo maupun basis pemilih Jokowi menguat dengan sendiri.

Berangkat dari keragu-raguan tersebut, menduga faktor-faktor penyebab terjadinya polarisasi isu dan keterbelahan publik, Riset ini menjadi menarik untuk diteliti, apa sebenarnya

dan apa yang membuat pemilih terbelah, seberapa besar bahasa politik identitas merusak tenun kebangsaan kita? Menguatnya komponen ideologis (party-ID, polarisasi isu) pada pemilu serentak berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di Sumatera Barat sebesar 2.488.733 suara (85.95%). Hal sama juga terjadi pada basis elektoral capres-cawapres pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, dugaan mengentalnya komponen ideologis (party-ID, polarisasi isu) juga ikut berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara Jokowi-Ma'ruf di Nusa Tenggara Timur sebesar 2.368.982 (88.57%). Hipotesis awal pengaruh komponen ideologis dan sistem pemilu membuat antara strategi dan narasi kampanye tidak berbanding lurus dengan perolehan suara. Capres Jokowi yang sudah bolak-balik ke Sumatera Barat, penetrasi pada basis-basis segmen pemilih Prabowo, digempur pakai strategi apapun oleh capres Jokowi, tetap saja rendah presentase perolehan suara Jokowi, hal yang sama juga terjadi pada capres Prabowo. Dugaan peneliti pembelahan ideologi dan "polarisasi isu" tidak bisa diabaikan, polarisasi yang mengental, menjadi faktor penyebab pada basis-pemilih Prabowo maupun pada basis pemilih Jokowi menguat dengan sendiri.

Teori kepemilikan isu dalam pemungutan suara yang menekankan peran kampanye dalam menetapkan kriteria pemilih untuk memilih di antara kandidat. Fokus kandidat untuk "menekankan isu-isu" di mana mereka diuntungkan dan lawan politik mereka kurang dihargai. Ini menjelaskan faktor struktural dan variabel sistem kepartaian yang menyebabkan para kandidat menekankan isu secara berbeda. Penekanan "isu" khusus untuk kandidat; pemilih mendukung kandidat dengan reputasi partai dan kinerja berdasarkan kompetensi yang lebih besar dalam menangani masalah yang menyangkut pemilih.

Apakah polarisasi ideologi yang makin mengeras di masing-masing provinsi itu tadi meniadakan program, strategi kampanye, mesin partai dan figur. Polarisasi ideologis dikaitkan dengan strategi dan narasi kampanye dengan hasil akhir pemilu tidak berkesesuaian. Jokowi kesulitan penetrasi ke basis pemilih Prabowo pada pemilu presiden 2014 dan 2019, berkali-kali datang ke Sumatera Barat, menawarkan sekian banyak program dan proyek waktu kampanye ke daerah provinsi tersebut, Presiden Jokowi datang berkali-kali ke Aceh, datang berkampanye ke basis Prabowo yang menang pada pemilu presiden 2014, namun tetap saja Jokowi kalah. Di saat yang sama Jokowi hanya beberapa kali saja datang ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun hasilnya menang di provinsi tersebut. Begitu juga sebaliknya Prabowo berkali-kali datang ke basis pemilih Jokowi di Jawa Tengah, Sandiga Uno datang dan hampir berkunjung berkampanye di seluruh kab/kota di Jawa Tengah, sampai mendirikan posko

pemenangan nasional dan tidur di sana. Hasilnya antara strategi kampanye dengan suara yang diperoleh tidak berkesesuaian dengan hasil akhirnya.

Prabowo-Sandi yang tadinya tidak sering datang kampanye ke Sumatera Barat dan ke Aceh justru mendapatkan perolehan suara pilpres 2019 di Provinsi Sumatera Barat menang telak sebesar 85,95 persen, sementara Prabowo-Sandi perolehan suara di Jawa Tengah makin rendah dibandingkan pemilu presiden 2014 yakni sebesar 22,71 persen. Sebaliknya Jokowi yang jarang datang ke Provinsi Jawa Tengah hanya memperoleh suara sebesar 77,29 persen. Di Sumatera Barat justru Jokowi lebih turun lagi perolehan suaranya dibandingkan pada pemilu presiden 2014 sebesar 23,1 persen. Pada pemilu presiden 2019 perolehan suara Jokowi turun hanya sebesar 14,05 persen.

Model kepemilikan isu yang dikembangkan oleh John Petrocik (1996). STV terjadi karena pemilih menetapkan standar yang berbeda dalam pemilu yang berbeda. Pada “pilpres”, pemilih lebih memandang “isu dan program” yang ditawarkan oleh capres. Sedangkan di dalam “pileg”, pemilih cenderung lebih memilih “sosok/figur”. Jadi, teori kepemilikan isu yang disampaikan John Petrocik berpendapat bahwa pemilih dengan sengaja membuat pembelahan suara atau dengan pilihan sadar membagi suara pemilihan karena tujuan tertentu. Contohnya, pada “pemilu presiden” biasanya pemilih/konstituen lebih fokus untuk memandang “isu” yang diangkat serta program yang coba mereka tawarkan. Berbeda dengan pemilu legislatif yang cenderung menguat faktor “sosok” dalam memutuskan pilihan mereka. Analisa ini mengasumsikan pemilih sebagai orang yang rasional (rational choice).

Kedekatan ideologis yang diraih tokoh karismatik di tengah menguatnya polarisasi ideologis yang tinggi membuat pemilih mengabaikan hal-hal lain, dalam hal ini “meniadakan uang”, “meniadakan partai”, meniadakan tekanan aparat, meniadakan logistik dan lain lain. Hipotesis pengaruh “komponen ideologis” dan sistem pemilu membuat antara strategi dan narasi kampanye tidak berbanding lurus dengan hasil perolehan suara. Capres Jokowi yang sudah bolak-balik ke Sumatera Barat, penetrasi pada basis-basis segmen pemilih Prabowo, digempur pakai strategi apapun oleh capres Jokowi, tetap saja rendah presentase perolehan suara Jokowi, hal yang sama juga terjadi pada capres Prabowo. Dugaan peneliti pembelahan “ideologi” dan “polarisasi isu” tidak bisa diabaikan, polarisasi yang mengental pada blok ideologis masing-masing pendukung capres sesuai dengan keterikatan preferensi politik, menjadi faktor penyebab pada basis-pemilih Prabowo maupun pada basis pemilih Jokowi menguat dengan sendiri.

Model struktural yang dihasilkan mampu mengidentifikasi empat faktor penentu pilihan partai politik pada pemilu legislatif anggota DPR pusat, salah satunya “preferensi isu” (polarisasi isu). Faktor-faktor ini berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pilihan partai politik melalui mediasi preferensi isu. Hasil penelitian ini berbeda dengan disertasi Gaffar, Kristiadi, dan Mallarangeng, tentang tidak adanya pengaruh kelas ekonomi, sekaligus mencabar mazhab Colombia tentang pengaruh umur, jenis kelamin, dan agama terhadap pilihan partai. Temuan penelitian ini juga mencabar beberapa tesis utama mazhab Michigan seperti pengaruh “identifikasi partai” (party-ID) terhadap “preferensi isu” dan subordinasi preferensi pribadi di dalam identifikasi partai (Muhammad Asfar, 2019).

Polarisasi isu baik politik identitas menjadi narasi dalam memenangkan perhelatan kontestasi elektoral pilpres 2019, keterbelahan publik yang kerusakannya merusak tenun kebangsaan. Polarisasi isu dengan masuk ke zona politik identitas sangat berbahaya sekali, terbukti berhasil membuat keterbelahan sosial yang cukup melukai. Masing-masing capres kerap memainkan dan membenturkan isu-isu identitas untuk strategi menjatuhkan lawan-politik (downgrade). “Isu isu identitas” dikapitalisasi untuk dijadikan sebagai komoditas politik untuk menguatkan dukungan pada basis pada segmen masing-masing pemilih capres. Pengiringan opini lewat “isu agama” dilakukan untuk meraih suara pemilih dengan menyerang kubu kontestan lawan politik dengan membingkai isu-isu agama.

Masa kampanye pilpres 2019 seyogyanya menjadi sarana sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai gagasan yang ditawarkan oleh kandidat paslon. Publik menanti munculnya beragam narasi programatik yang akan dijadikan dasar dalam menentukan pilihan. Sayangnya, masa kampanye didominasi oleh kampanye yang mengkapitalisasi isu-isu SARA, politik identitas, konten berita palsu dan ujaran kebencian, isu-isu yang tidak substantif.

Alih-alih mendorong proses pemilu yang berkualitas, fenomena ini justru semakin menambah polarisasi di masyarakat, bahkan disinyalir semakin mendorong apatisme terhadap pemilu dan menguatnya gerakan mendorong golput. Apakah ini berjalan secara alamiah, atau di desain, di produksi secara senggaja oleh kelompok yang menang dengan cara transaksional dan pragmatis, meskipun merusak tenun kebangsaan dan keindonesian. residu dari tajamnya “polarisasi” politik dan politisasi isu-isu identitas yang terjadi selama Pilpres 2014 dan 2019, masih dirasakan sisanya sampai sekarang bagaimana dampak dan kerusakannya. Contoh kasus pengeroyokan terhadap aktifis media sosial Ade Armando hanya puncak klimaksnya, bahwa benturan dan “keterbelahan” tersebut nyata dan ada terjadi di tengah masyarakat. Elite politik, media dan kelompok masyarakat sipil harus kian tersadarkan, perlu aktif mengambil bagian

dalam upaya meredam politisasi identitas dan melakukan kontra narasi terhadap politisasi “isu-isu identitas” yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat selama ini.

PENUTUP

Mengingat kembali hari-hari berat ketika kontestasi pemilihan umum presiden dan legislatif. Hanya menyisakan dua kandidat dan memberi implikasi yang sangat dalam pada pertentangan dan keterbelahan publik. Dengan demikian, narasi politik identitas yang bernada negatif sudah semestinya dikikis. Hal ini demi mencegah perpecahan dan pembelahan sosial yang semakin tajam di masyarakat. Tidak bisa tidak, dalam hal ini dibutuhkan komitmen kuat kedua belah pihak untuk tidak kembali bermain-main dengan isu sensitif berupa politik identitas.

Pembelahan sosial yang semakin tajam di masyarakat tentu sangat tidak produktif jika dibiarkan berlanjut dan berlarut-larut. Pangkal perkara dari situasi ini adalah dangkal dalam narasi, literasi, dan imajinasi pada kedua capres. Dan sayangnya, virus ini menular ke mana-mana. Namun, lagi-lagi, aturan pemilu terkait presidential threshold menjadi “kebuntuan politik” yang menghambat putra-putri terbaik bangsa untuk tampil ke panggung politik yang lebih tinggi. Imbasnya, fakir narasi dalam kontestasi.

Aktor politisi harus mampu memberikan contoh “ketauladanan” yang baik, politik yang berbasiskan akhlak dan etika (fatsun politik kelas tinggi) tidak menyudutkan dan membuat polemik di setiap pernyataan pendapat politiknya. Sepatutnyalah mereka hanya mengeluarkan dan menyusun kata-kata yang meneduhkan, menyematkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bertarung. Jangan justru membuat gesekan, memantik polemik dan blunder politik sehingga ujungnya bunuh diri politik. Perlu diingat pula oleh pasangan capres-cawapres dan tim pemenangannya bahwa mereka mempunyai beban moral untuk menjaga “keutuhan bangsa” dengan tidak mempertajam “pembelahan” dan konflik sosial. Dengan demikian, masing-masing kandidat dan timnya harusnya arif dan bijak dalam membuat pernyataan, tidak ada ruginyanya belajar mengambil hikmah dari pemilu tahun 2019 yang lalu, menolak menjadikan politik identitas sebagai komoditas politik transaksional pragmatis semata. Fokus pilpres harusnya masuk pada narasi “platform programatik”, justru mengambil strategi efektif untuk menggaet suara pemilih dengan isu-isu politik identitas, meminggirkan isu-isu kesejahteraan, isu-isu pembangunan, lebih banyak pada isu-isu non programatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Karp, J.A., Vowles, J., Banducci, S.A., Donovan, T., 2002. Strategic voting, party activity, and candidate effects: testing explanations for split voting in New Zealand's new mixed system. *Electoral Studies* 21 (1), 1-22.
- Moser, R.G., Scheiner, E., 2005. Strategic ticket-splitting and the personal vote in mixed-member electoral systems. *Legislative Studies Quarterly* 30 (2), 259-276.
- Pappi, F.U., Thurner, P.W., 2002. Electoral behaviour in a two-vote system: incentives for ticket-splitting in Bundestag elections. *European Journal of Political Research* 41 (2), 207-232.
- Rallings, C., Thrasher, M., 2003. Explaining split-ticket voting at the 1979 and 1997 general and local elections in England. *Political Studies* 51 (3), 558-572.
- Roscoe, D.D., 2003. The choosers or the choices? Voter characteristics and the structure of electoral competition as explanations for ticket-splitting. *Journal of Politics* 65 (4), 1147-1164.
- Schoen, H., 1999. Split-ticket voting in German federal elections, 1953-90: an example of sophisticated balloting? *Electoral Studies* 18 (4), 473-496.
- Burden, B.C., 2009. Candidate-driven ticket splitting in the 2000 Japanese elections. *Elect. Stud.* 28 (1), 33-40.
- Chandra, K., 2009. Why voters in patronage democracies split their tickets: strategic voting for ethnic parties. *Elect. Stud.* 28 (1), 21-32.
- Lewis-Beck, M.S., Nadeau, R., 2004. Split-ticket voting: the effects of cognitive madisonianism. *J. Politics* 66 (1), 97-112.
- Elklit, J., Kjær, U., 2005. Are Danes more inclined to ticket splitting than the Swedes and the English? *Scandinavian Political Studies* 28, 125-139.
- Ferejohn, J.A., Calvert, R.L., 1984. Presidential coattails in historical perspective. *American Journal of Political Science* 28, 127-146.
- Johnston, R.J., Hay, A.M., 1984. The geography of ticket-splitting: A preliminary study of the 1976 elections using entropy-maximizing methods. *The Professional Geographer* 36, 291-296.
- Johnston, R.J., Pattie, C.J., 2002. Campaigning and split-ticket voting in new electoral systems: The first MMP elections in New Zealand, Scotland, and Wales. *Electoral Studies* 21, 583-600.
- Samuels, D.J., 2000. The gubernatorial coattails effect: federalism and congressional elections in Brazil. *Journal of Politics* 62, 240-253.
- Schoen, H., 1999. Split-ticket voting in German federal elections, 1953-90: An example of sophisticated balloting? *Electoral Studies* 18, 473-496.

Qodari, Muhammad. 2016. *Spilte-Ticket Voting dan Faktor-Faktor Yang Menjelaskan Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014*. Yogyakarta: Disertasi.

Aminah, Siti dan Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Plescia Carolina. *Split ticket voting in an STV system: choice in a non- strategic context*. Trinity College, Dublin, Ireland: University of Vienna

Edward G. Carmines & Michael J. Ensley, 2004. *Ideologically Polarized Parties, Ideologically Inconsistent Voters, and Split Ticket Voting in the United States*. Chicago: American Political Science Association.

Stefaan Walgrave, Karolin Soontjens. 2019. *How voters form associative issue ownership* . Belgium: University of Antwerp.

David C. Barker., Adam B. Lawewnce. 2006. *Partisanship and the dynamics of “candidate centered politics” in American presidential nominations*. USA: Electoral Studies.

John R. Petrocik. 1996. *Issue Ownership in Presidential Elections, with a 1980 Case Study*. Los Angeles: American Journal of Political Science. University of California.